

MENGUNGKAP KESIAPAN IMPLEMENTASI SAK ETAP DALAM MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KABUPATEN KUNINGAN

¹Teti Rahmawati, ²Oktaviani Rita Puspasari

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Kuningan

e-mail: ¹tetirahmawati170681@gmail.com, ²oktavianipuspasari@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kuningan, kesiapan mereka dalam implementasi SAK ETAP pada penyusunan Laporan Keuangan para pelaku UMKM, serta dampak dari implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dirancang sebagai penelitian *explanatory survey* yang bersumber pada data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK ETAP, sebanyak 57% tidak paham terhadap SAK ETAP, 38% sangat tidak paham terhadap SAK ETAP dan hanya sebesar 5% dari pelaku UMKM yang paham terhadap SAK ETAP. Berdasarkan hasil kuisioner sekitar 74 % responden menilai laporan keuangan sangat penting dalam perkembangan usaha dan 7 persen menyatakan sangat penting. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat dikatakan pengusaha UMKM menganggap bahwa pelaporan keuangan dan pembukuan akuntansi penting untuk perkembangana usaha meredakan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kegiatan UMKM

Kata kunci : UMKM, SAK ETAP, Kualitas Laporan Keuangan, Akses Perbankan

1. Pendahuluan

Masyarakat ekonomi ASEAN mempunyai kesempatan dan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Terutama untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) maka seluruh elemen masyarakat digerakan dan dipersiapkan untuk bisa bersaing. Dalam segi kuantitas terjadi perkembangan jumlah UMKM dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga dianggap mempunyai fundamental usaha dan pemasaran yang mulai meningkat. Pencapaian yang luar biasa serta besarnya potensi dari UMKM ternyata tidak serta merta menyebabkan UMKM mampu bergerak, mengembangkan diri dan bersaing dalam memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat. Kendala utama yang muncul adalah keterbatasan modal yang dimiliki serta kesulitan dalam memperoleh akses sumber permodalan. Sementara dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana para pelaku usaha dituntut untuk mampu bersaing dalam pasar bebas. Mereka dituntut untuk lebih berinovasi dan kreatif dalam menciptakan produk serta mengembangkan usaha. Hal tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang besar, dan menuntut adanya pemisahan terhadap dana atau modal milik pribadi dengan dana yang dimiliki perusahaan.

Sebagian besar Pelaku UMKM melakukan kegiatan usaha dengan tujuan hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tercukupinya kebutuhan sehari hari tersebut dianggap

sebagai keberhasilan usaha. Para pelaku UMKM tidak mau untuk melakukan pembukuan atas transaksi keuangan yang dilakukan. Pelaku UMKM yang cenderung menjalankan usaha untuk pemenuhan kebutuhan dan tidak berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. Sebagian besar UMKM hanya menggunakan modal yang berasal dari diri sendiri maupun pemilik, perputaran atas hasil usaha yang diperoleh, sehingga usaha yang dikembangkan hanya sebatas tingkat modal yang dimiliki saja (Alhusain, 2009). Pelaku UMKM menganggap bahwa pinjaman terhadap bank hanya akan menjadi beban. Keberatan para pelaku UMKM untuk menggunakan modal dari kredit juga dikarenakan persyaratan yang rumit yang diberikan oleh pihak pemberi kredit. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki UMKM membuat mereka sering terjebak dengan sumber-sumber dana informal, yang sekali lagi disebabkan kerumitan persyaratan sumber dana pada sektor keuangan formal. Menggunakan pinjaman dari sektor informal seperti rentenir menimbulkan masalah berikutnya. Beban bunga yang tinggi dan berlipat lipatan menyebabkan para pelaku usaha kesulitan bahkan menyebabkan kehilangan aset karena diambil oleh renten.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi praktek renten dan mendorong perkembangan UMKM. Salah satunya adalah program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian KUKM maupun melalui pihak perbankan. Salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitas pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat. KUR sendiri bertujuan untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM dalam membantu memberi bantuan akses permodalan (Osa, 2010 pada Rudiantoro dan Siregar, 2011). Namun fenomena yang terjadi adalah realisasi program KUR tidak memenuhi target penyaluran dana KUR yang ada. Penyebab dari sedikitnya KUR terserap oleh masyarakat adalah kurangnya informasi yang memadai yang diperoleh bank penyalur KUR terutama informasi mengenai pembukuan atau laporan keuangan. Mayoritas pelaku UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi pada usaha yang dilakukan, sehingga informasi tersebut dirasa begitu mahal bagi pihak perbankan (Baas dan Schrooten, 2006).

Kemudahan akses modal perbankan dapat diperoleh apabila para pelaku UMKM bisa menyampaikan informasi mengenai keadaan usaha dalam bentuk pembukuan atau laporan keuangannya. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No 20 tahun 2008 menyatakan adanya kewajiban bagi usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi (Tuti dan Dwijayanti, 2014). Akan tetapi adanya peraturan tersebut tidak serta merta membuat pelaku UMKM melakukan pencatatan. Sehingga mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk menyusun dan menerbitkan standar yaitu Standar Akuntansi untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM agar dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dimana laporan tersebut dapat diaudit dan mendapat opini atas audit yang dilakukan. Sebelum adanya standar ini penggunaan standar PSAK-IFRS dirasa sangat berat untuk dapat diaplikasikan pada penyusunan laporan keuangan UMKM. Kemudahan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar SAK ETAP ini diharapkan akan dapat diaplikasikan pada setiap UMKM, dengan tujuan akhir adalah memberikan keterpercayaan pada pihak-pihak eksternal seperti investor, pemasok atau bahkan perbankan terkait kemudahan akses permodalan.

Perlunya identifikasi terhadap UMKM yang masih tidak melakukan pembukuan sama sekali atau melakukan pencatatan hanya sebatas transaksi sederhana usaha perlu dilakukan. Seperti yang dikutip dari hasil penelitian Pinasti (2001) yang menemukan bahwa para pedagang di wilayah Banyumas cenderung tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi

akuntansi dalam melakukan pengelolaan usaha. Mereka melakukan usaha hanya dengan mengandalkan hasil pantauan situasi pasar, faktor laba adalah urusan yang utama dan pencatatan hanya dianggap sebagai hal yang merepotkan tanpa manfaat.

Pola seperti ini yang merugikan para pelaku UMKM sendiri, dimana peluang pengembangan usaha yang dapat diraih dengan bantuan permodalan akan sulit diperoleh tanpa adanya informasi akuntansi yang berkaitan dengan kondisi keuangan usaha. Cara pandang pelaku UMKM tentang pentingnya proses akuntansi perlu untuk diarahkan agar mereka lebih peduli dan paham atas manfaat lebih yang akan diperoleh dengan melakukan aktivitas akuntansi serta peningkatan kualitas dalam pelaporan keuangan atas unit usaha mereka. Said (2009) dalam Rudiantoro dan Siregar (2011) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi yang terbatas, kerumitan, serta persepsi bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting menyebabkan UMKM masih saja belum melakukan proses akuntansi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Kabupaten Kuningan?

2. Tinjauan Pustaka

Business entity concept atau dikenal dengan sebutan *entity theory* digagas pertama kali oleh William A Paton. Teori ini memberikan penekanan pada *stewardship* atau pengelolaan dan *accountability* atau pertanggungjawaban. Dalam teori ini perusahaan dengan pemiliknya dipandang secara terpisah. Kepemilikan aset dan kewajiban perusahaan akan terpisah dari kepemilikan aset dan kewajiban para pemegang ekuitas. Berdasarkan konsep tersebut maka dirumuskan sebuah persamaan dasar akuntansi sebagai langkah awal konsep pencatatan pembukuan akuntansi yang pada tahap berikutnya dikembangkan untuk menyusun posisi keuangan atau neraca.

Konsep ini menurut Suwardjono (2005) membuat sebuah personifikasi bahwa badan usaha dianggap sebagai “orang” yang bisa terlibat dalam perbuatan hukum dan ekonomi, seperti pembuatan perjanjian atau kontrak dan boleh memiliki aset. Sehingga menurut teori ini hubungan antara entitas dengan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis terutama dalam hak dan kewajiban atau utang piutang. Meskipun antara pemilik dan perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dan berbeda, pemilik tetap memiliki hak atas pembagian keuntungan dari usaha yang sudah dilakukan.

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang berkembang di masyarakat yang bisa memberikan lapangan kerja baru, memberikan pelayanan ekonomi lebih dekat dan secara luas kepada masyarakat, mampu memberikan peran dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009).

UMKM sebagaimana dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang tertera UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Adapun Kriteria perusahaan yang masuk kriteria usaha mikro adalah Memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp 50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau memiliki omset penjualan penjualan selama satu tahun maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kementerian Koperasi dan Usaka Kecil Menengah mempunyai kriteria untuk mengelompokkan UMKM berdasarkan tiga kriteria yaitu total penjualan dalam satu tahun, status usaha dan total asset. dengan penjelasan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 juta.
- b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria :
 1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
 3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
 4. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan ETAP

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sudah menyusun dan menerbitkan standar akuntansi keuangan sebagai panduan untuk UMKM dalam menyusun laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) per 1 Januari 2011. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (IAI, 2009). Apabila dibandingkan dengan IFRS standar ETAP dibuat lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku UMKM.

Tujuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan serta laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (IAI, 2009).

Pelaku UMKM tidak serta merta langsung mengimplementasikan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan meskipun SAK ETAP sudah menawarkan banyak dan manfaat dan kemudahan. Bahkan diantaranya masih banyak yang belum melakukan aktivitas pembukuan maupun proses akuntansi dalam mengelola transaksi ekonomi yang terjadi pada unit usahanya. Beberapa faktor disinyalir menyebabkan keengganan masyarakat, diantaranya : tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keahlian terkait bidang akuntansi, kurangnya tenaga ahli yang dapat melakukan proses pembukuan yang sesuai standar, persepsi yang menganggap bahwa aktivitas pembukuan tidak penting untuk perusahaan, kerumitan dalam proses akuntansi yang menyebabkan mereka masih tidak memisahkan dana pribadi dan dana yang digunakan untuk bisnis (Hutagaol, 2012).

Laporan keuangan adalah output yang dihasilkan dari proses akuntansi. Akuntansi menurut Warren, et al (2014) adalah sebuah laporan yang disediakan oleh sistem informasi untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan. Peranan

akuntansi dalam bisnis adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer perusahaan maupun pihak-pihak diluar perusahaan yang memerlukan informasi mengenai kondisi ekonomi perusahaan yang mendasari pengambilan keputusan maupun kebijakan-kebijakan.

Laporan keuangan yang berkualitas bagi UMKM bisa dihasilkan jika dalam proses penyusunan maupun proses akuntansi yang dilakukan disesuaikan dengan standar yang berlaku. Kriteria entitas tanpa akuntabilitas publik sendiri dikembangkan dengan membandingkannya dengan yang dimaksud entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu (Narsa et al, 2012):

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal;
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang sebagai penelitian *explanatory survey* yang bersumber pada data Primer . Penelitian *explanatory* adalah penelitian untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha mendapatkan jawabannya (*verifikative*) hubungan kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis. Pengumpulan data dilakukan kuisioner, wawancara dan studi pustaka. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Kuningan yang sudah memiliki ijin (legal) berdasarkan data pada dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan sampai tahun 2015 UMKM yang terdiri dari UKM jenis industri, usaha perdagangan dan jasa. Sampel yang diambil dari populasi yang ada dilakukan secara sample Random (acak), dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% dari daftar pengambilan sampel yang dianggap representative menurut Isaac dan Michael (Sugiyono, 2003).

4. Hasil

4.1 Statistik Deskriptif

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Dari Lokasi Usaha

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa karakteristik responden dilihat dari lokasi usaha menunjukkan sebanyak 29% responden berada di Kecamatan Kuningan, 10% berada di daerah Kecamatan Cigugur, 12% berada di Kecamatan Kramatmulya, 10% berkedudukan di Kecamatan Cilimus, 10% berada di daerah kecamatan Kadugede, 7% lokasi usaha responden berada di Kecamatan Sindangsari, 5% berada di daerah Kecamatan Ciawigebang, 2% berada didaerah Kecamatan Garawangi, 5% berlokasi di Kecamatan Lebakwangi, 2% berkedudukan di Kecamatan Luragung dan 10% berlokasi di Kecamatan Cibeureum. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa UMKM yang menjadi responden merata di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Tidak hanya berpusat pada daerah yang ada di perkotaan saja.

B. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa pengusaha UMKM di Kabupaten Kuningan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Karena dari hasil rekapitulasi responden diperoleh sebanyak 60% pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kuningan berjenis kelamin laki-laki dan 40% berjenis Kelamin Perempuan.

C. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usaha diketahui bahwa karakteristik responden mayoritas melakukan usaha dalam sektor industri manufaktur yaitu sebesar 55%, 31% bergerak dalam jual beli (perdagangan) dan sisanya yaitu sebesar 14% bergerak dalam bidang jasa.

D. Karakteristik responden Berdasarkan Usia

Dari pengolahan data menunjukkan informasi bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan sebagian besar berada pada rentang usia antara 41 – 50 tahun yaitu 48%, Pelaku usaha UMKM yang berusia kurang dari 30 tahun ada sebesar 17%, Selanjutnya sebesar 24% Pelaku UMKM berusia antara 31- 40 tahun. Dan sisanya sebesar 12% pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kuningan berusia lebih dari 50 Tahun

4.2 Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di wilayah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan analisa untuk variabel pemahaman SAK ETAP menunjukkan bahwa sebanyak 57% pelaku usaha tidak memahami SAK ETAP bahkan 38 % mengaku sangat tidak paham mengenai SAK ETAP. Hal tersebut diperkirakan karena rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan SAK ETAP dengan ditunjukkan bahwa 74 % responden menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima informasi atau sosialisasi mengenai penerapan SAK ETAP untuk pembukuan mereka dan hanya sebesar 26% yang mengaku pernah mendapatkan informasi sebanyak satu kali baik dalam kegiatan formal maupun informal.

A. Pelaku UMKM Melakukan Pembukuan

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM berpendapat penting dilakukan pembukuan akuntansi yaitu sebanyak 74%, sedangkan 7% berpendapat sangat penting dilakukan pembukuan akuntansi, 7% berpendapat tidak penting dilakukan pembukuan akuntansi dan 12% berpendapat bahwa sangat tidak penting dilakukan pembukuan akuntansi.

B. Terdapat Pegawai Khusus yang Bertanggungjawab Pembukuan

Berdasarkan pengolahan data mengenai adanya pegawai khusus yang bertanggungjawab dibidang pembukuan, sebanyak 43% responden berpendapat bahwa itu penting dilakukan, 10% responden berpendapat sangat penting dilakukan, 38% responden berpendapat tidak penting dilakukan dan 10% responden lainnya berpendapat sangat tidak penting dilakukan.

C. Terdapat Software Akuntansi untuk Mendukung Pembukuan Akuntansi

Berdasarkan analisis data tentang diperlukannya software akuntansi untuk mendukung pembukuan akuntansi sebagian besar responden berpendapat bahwa hal

tersebut tidak penting dilakukan yaitu sebesar 50%, sedangkan yang lainnya sebesar 2% berpendapat sangat penting dilakukan, 12% berpendapat penting dilakukan dan 36% lainnya berpendapat sangat tidak penting dilakukan.

D. Pembukuan Transaksi dibuat Secara Rutin

Berdasarkan analisis dai hasil pengolahan data diperoleh informasi mengenai pembukuan transaksi dibuat secara rutin, sebesar 69% responden berpendapat penting dilakukan sedangkan 17% responden berpendapat sangat penting dilakukan, 12% berpendapat tidak penting dilakukan dan 2% responden berpendapat tidak penting dilakukan.

E. Standar Akuntansi Dibutuhkan untuk Pembukuan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebanyak 57% responden berpendapat tidak penting dilakukan standarisasi akuntansi, sedangkan sebesar 2% berpendapat sangat penting, 26% berpendapat penting dan sebesar 14% berpendapat sangat tidak penting adanya standar akuntansi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK ETAP, sebanyak 57% tidak paham terhadap SAK ETAP, 38% sangat tidak paham terhadap SAK ETAP dan hanya sebesar 5% dari pelaku UMKM yang paham terhadap SAK ETAP. Melihat kondisi ini maka kami menyimpulkan bahwa UMKM di kabupaten Kuningan belum siap untuk mengimplementasikan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena sebagian besar pelaku usaha belum memahami SAK ETAP. Sosialisasi dari pihak yang berkepentingan sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman. Lebih baik lagi kalau diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Implementasi SAK ETAP akan mempunyai peluang untuk diimplementasikan karena berdasarkan hasil analisis data sekitar 74 % responden menilai laporan keuangan sangat penting dalam perkembangan usaha dan 7 persen menyatakan sangat penting. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat dikatakan pengusaha UMKM menganggap bahwa pelaporan keuangan dan pembukuan akuntansi penting untuk perkembangana usaha mereka dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kegiatan UMKM. Sehingga kalau mereka sudah memahami SAK ETAP mereka mau mengimplementasikan SAK ETAP karena mereka menganggap pentingnya melakukan pelaporan keuangan dengan berdasarkan SAK ETAP.

Daftar pustaka

- Alhusain, Achmad Sani. 2014. Analisa Kebijakan Permodalan Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Bali Dan Sulawesi Utara) Kajian Vol 14 No.4.
- Baas, Timo dan Mechthild Schrooten. (2006). Relationship Banking and SMEs : A Theoretical Analysis. Small Business Economic Vol 27.
- Hutagaol, R. M. N. 2012. Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah. Jurnal Ilmiah. Vol. 1. No. 2.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Murniati. (2002). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Semarang : Universitas Diponegoro.

- Narsa, I Made et al. 2012. Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK ETAP Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi Tahun XXII No 3* 2012.
- Pinasti, Margani. 2001. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, No 1 Vol 3.
- Probosari, Devi. 2014. Praktik Akuntansi dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi (Sebuah Studi Pada UMKM. Skripsi.
- Rudiantoro, Rizki dan Sylvia Veronica Siregar. 2011. Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Tuti, Rias dan S. Patricia Febrina Dwijayanti. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014* "Towards a New Indonesia Business Architecture Sub Tema: "Business And Economic Transformation Towards AEC 2015" Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS.
- Warren et al, 2014. *Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia) Edisi 25*. Salemba Empat. Jakarta